

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013), yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, tujuan penelitiannya untuk menguji pengaruh dari DAU, DAK, PAD, dan belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitiannya menggunakan analisis statistik deskriptif dengan model regresi linear berganda. Didapatkan hasil penelitiannya menunjukkan DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2014), yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, menghasilkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Belanja Barang Dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Daud (2017), yang berjudul “Analisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015”, menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sementara itu tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2008), yang berjudul “Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Output Regional Kota Malang”, menghasilkan bahwa variabel investasi (K) hanya mampu menyumbangkan 0,003 persen, sedangkan tenaga kerja sebesar 0,246 persen dan Pengeluaran pemerintah sebesar 0,293 persen terhadap Produk Domestik Regional bruto. Ketiga variabel tersebut mempunyai arah koefisien positif artinya hubungan yang searah dengan PDRB (jika variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah bertambah maka PDRB juga akan bertambah, dan sebaliknya jika ketiga variabel yaitu investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berkurang maka PDRB akan turun). Dari ketiga variabel bebas tersebut yang mempunyai sumbangan yang besar terhadap PDRB Kota Malang adalah pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 0,293.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasdi (2015), yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”, menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk Dana Alokasi

Khusus memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hasdi (2015), dimana obyek penelitiannya adalah pemerintahan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hasdi adalah pada daerah yang diteliti yaitu daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tahun juga pada tahun 2017 penelitian.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah aspek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju ke arah perbaikan secara terus dalam bidang ekonomi yang melingkupi pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Todaro dkk, 2006) ada tiga komponen pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal.
- b. Pertumbuhan penduduk.
- c. Kemajuan teknologi.

1. Teori pertumbuhan ekonomi

a. Rostow

Teori ini berasal dari Walt W. Rostow, ahli sejarah ekonomi di Amerika Serikat. Menurutnya, perubahan menuju kemajuan ekonomi dipaparkan melalui beberapa tahapan yang dilalui setiap negara yaitu, tahapan perekonomian tradisional, pra kondisi tinggal

landas tahapan tinggal landas, menuju kedewasaan dan tahapan konsumsi massa tinggi.

b. Keynesian (Harrod-Domar)

Teori ini menjelaskan tentang pembentukan modal yang menjadi faktor penting penentuan pertumbuhan ekonomi dan didapatkan dari akumulasi modal. Menurut teori ini, kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat walaupun kapasitas produksi bertambah. Pendapatan nasional bisa mengalami kenaikan jika kenaikan pengeluaran masyarakat terjadi.

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, indikator konsep dasar ekonomi makro yang digunakan yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah indikator ekonomi makro suatu daerah untuk menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu daerah. Dengan menghitung PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, didapatkan kesimpulan tentang pembangunan di suatu daerah yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan produksi di berbagai sektor pekerjaan yang ada (Saggaf, 1999: 15).

Gambaran Pdrb di kabupaten atau kota yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari data berbagai sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri, listrik dan gas, air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang,

konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan lainnya.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai yang didapatkan dari usaha barang dan jasa, dihasilkan bagian ekonomi dalam suatu daerah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

PDRB atas dasar harga bertujuan meninjau struktur dan pergeseran ekonomi, sedangkan harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (BPS, 2007:2). Angka-angka PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu :

1. PDRB Pendekatan Produksi

PDRB merupakan nilai jasa dan barang akhir yang dibuat oleh unit produksi di suatu wilayah/provinsi dalam jangka tertentu. Unit-unit tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha yaitu, pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; penyediaan akomodasi dan makan; informasi dan komunikasi; administrasi pemerintahan, pemerintahan dan jaminan sosial wajib; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; dan jasa lainnya.

2. PDRB Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendapatan adalah balas jasa beberapa faktor produksi yang ikut pada proses produksi dalam suatu wilayah di waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung. PDRB juga termasuk dalam penyusutan serta pajak tak langsung neto, sedangkan jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. PDRB Pendekatan Pengeluaran

Dengan melihat sisi pengeluaran, menjadi salah satu pendekatan untuk mengetahui nilai PDRB. Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi 4 kelompok pengeluaran, yaitu investasi, konsumsi, ekspor bersih dan pembelian pemerintah (Mankiw, 2006)

Simbol Y yang digunakan untuk GDP menjadi : $Y = (C + I + G + NX)$ atau yang disebut sebagai *national income account identity*.

Persamaan total pengeluaran dari konsumsi rumah tangga (C) Investasi perusahaan (I) pembelian pemerintah (G) dan Ekspor Neto (NX).

Investasi terdiri dari barang-barang yang di beli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga di bagi 3 kelompok 1.) investasi tetap bisnis (*Bussines Fixed Investment*) 2.) investasi tetap residensi (*Residential Fixed Investment*) 3.) dan investasi persediaan (*Inventory Investment*). Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi di bagi menjadi 3 kelompok yaitu : antara lain barang tidak tahan lama dan barang tahan lama dan jasa (*service*). Sebanyak hampir 70% GDP berasal dari konsumsi, oleh karenanya konsumsi memegang peranan penting di perekonomian.

D. Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah termasuk ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan daerah. Pengurusan bendaharawan juga termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah semestinya mengarah kepada prinsip pokok anggaran sektor publik, diantaranya disiplin anggaran, transparansi dan akuntabilitas anggaran, partisipasi masyarakat, taat asas, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Kepmendagri Nomor 29 tahn 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan daerah

tiap tahunnya dan ditentukan sesuai peraturan daerah tentang APBD. Sesuai dengan pendekatan kinerja, sistem anggaran lebih mengutamakan pencapaian *output* dari perencanaan alokasi biaya dan *input* yang ditetapkan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD merupakan rencana anggaran daerah tiap tahunnya yang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD menjadi dasar pengelolaan anggaran daerah di tiap tahunnya, dan sebagai pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah untuk Desentralisasi di anggaran tiap tahunnya. Pengeluaran daerah untuk pelaksanaan desentralisasi dikerjakan sesuai yang ditentukan dalam APBD karena sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, untuk itu APBD sebagai dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Widjaja, 2007).

1. Penerimaan Daerah

Sumber penrimaan keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan dana perimbangan (Pheni Chalid 2005).

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Demi terlaksananya otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan sebagai penerimaan dari usaha untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi, PAD bukan berupa pemberian hibah, bantuan serta penyertaan modal, melainkan merupakan sumber dana pendapatan asli daerah. PAD berguna memberi

keleluasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi.

1) Pajak daerah

Merupakan tagihan dana wajib terutang pribadi, kelompok atau badan untuk daerah tanpa imbalan, bisa dipaksakan sesuai peraturan yang berlaku serta digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjadi pajak daerah provinsi meliputi: Pajak kendaraan diatas air Bea Milik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak pengambilan dan pemanfaatan air, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB). Yang termasuk pajak daerah Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Golongan C dan Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah atas jasa yang khusus disediakan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terbagi menjadi retribusi umum dan retribusi perizinan tertentu berdasarkan kewenangan tiap daerah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan pelayanan jasa dari tiap daerah atau wilayah yang bersangkutan.

3) Hasil kekayaan yang dipisahkan

BUMD merupakan sumber PAD lainnya pemerintah daerah dan merupakan cara efisien untuk pelayanan masyarakat. BUMD ini juga sebagai salah satu sumber penerimaan dan yang termasuk diantaranya adalah bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. (HAW.Wijaya,2002)

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat di upayakan oleh daerah dengan cara-cara yang tidak menyalahi aturan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi jasa giro, hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi berupa potongan atau bentuk lainnya dari hasil penjualan barang dan jasa.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sebagai pendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (HAW,Wijaya.2005)

Dana perimbangan dalam UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.33/2004 adalah terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus (Pheni Chalid, 2005).

Tujuan dari dana perimbangan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk meratakantiap daerah agar tidak yang tertinggal. Dana perimbangan meliputi :

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana APBN yang disalurkan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam yang termasuk penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pertambangan gas bumi, serta DBH dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, (UU No.33Th.53 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah pasal 11 tentang bagi hasil :273)

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah sebagai penyedia layanan dasar untuk masyarakat, juga sebagai salah satu penerimaan umum APBD. DAU juga berfungsi mendanai pengeluaran sebagai terlaksananya desentralsasi yang ditetapkan di suatu wilayah(HAW. Wijaya 2005).

Untuk kabupaten dan provinsi, DAU yang ditetapkan sebesar 90% dan 10% dan dihitung sesuai jumlah perkalian DAU

seluruh bobot daerah di Indonesia (Bratakusumah dan solihin, 2001).

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk mendanai investasi pengadaan serta meningkatkan sarana prasarana dengan umur minimal tiga tahun (HAW, Wijaya. 2005). Namun, daerah bersangkutan harus menyediakan biaya minimal 10% dari DAK yang di alokasikan APBD. Dananya sebagai dana pendamping terkecuali untuk daerah yang berkemampuan fiskal tidak memadai.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah suatu proses yang diberikan kepada daerah untuk mendapatkan keuangan daerah selain APBD. Pemerintah daerah mendapatkan pinjaman daerah setelah adanya persetujuan dari pemerintah pusat. Pinjaman daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berperan penting untuk pembangunan infrastruktur yang bisa berbentuk pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri. (Pheni Chalid, 2005)

2. Pengeluaran Daerah

Menurut permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung

Adalah belanja yang tidak berhubungan secara langsung di program pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung menurut permendagri

no.13 tahun 2006 terdiri dari bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga dan bantuan keuangan.

2. Belanja Langsung

Adalah belanja yang secara langsung berhubungan dengan program pemerintah. Belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai.

F. Hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Teori keynes, permintaan agregat menjadi penentu tingkat perekonomian. Dalam teorinya berpendapat apabila di periode tertentu adanya pembentukan modal, maka di saat mendatang perekonomian berkemampuan besar untuk menghasilkan barang dan jasa.

Jika PAD meningkat, maka dana yang ada ikut meningkat, dan pemerintah bisa lebih mencari potensi pada daerah tersebut. Caranya dengan melakukan pemberian porsi besar pada belanja modal untuk pembangunan, yang akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi.

G. Hubungan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro, terdapat tiga faktor atau kompoen utama pada pertumbuhan ekonomi, antara lain peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk (Amin, Pujiati, 2008).

Dengan adanya desentralisasi menjadikan suatu daerah besar terbagi menjadi beberapa bagian kecil yang terintegrasi dan bergerak efisien. Prawisetoto (Amin, pujiati, 2007) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal sebagai suatu pembagian keputusan dibidang fiskal yang termasuk aspek penerimaan serta aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik sebagai tugas dan fungsi pemerintah daerah.

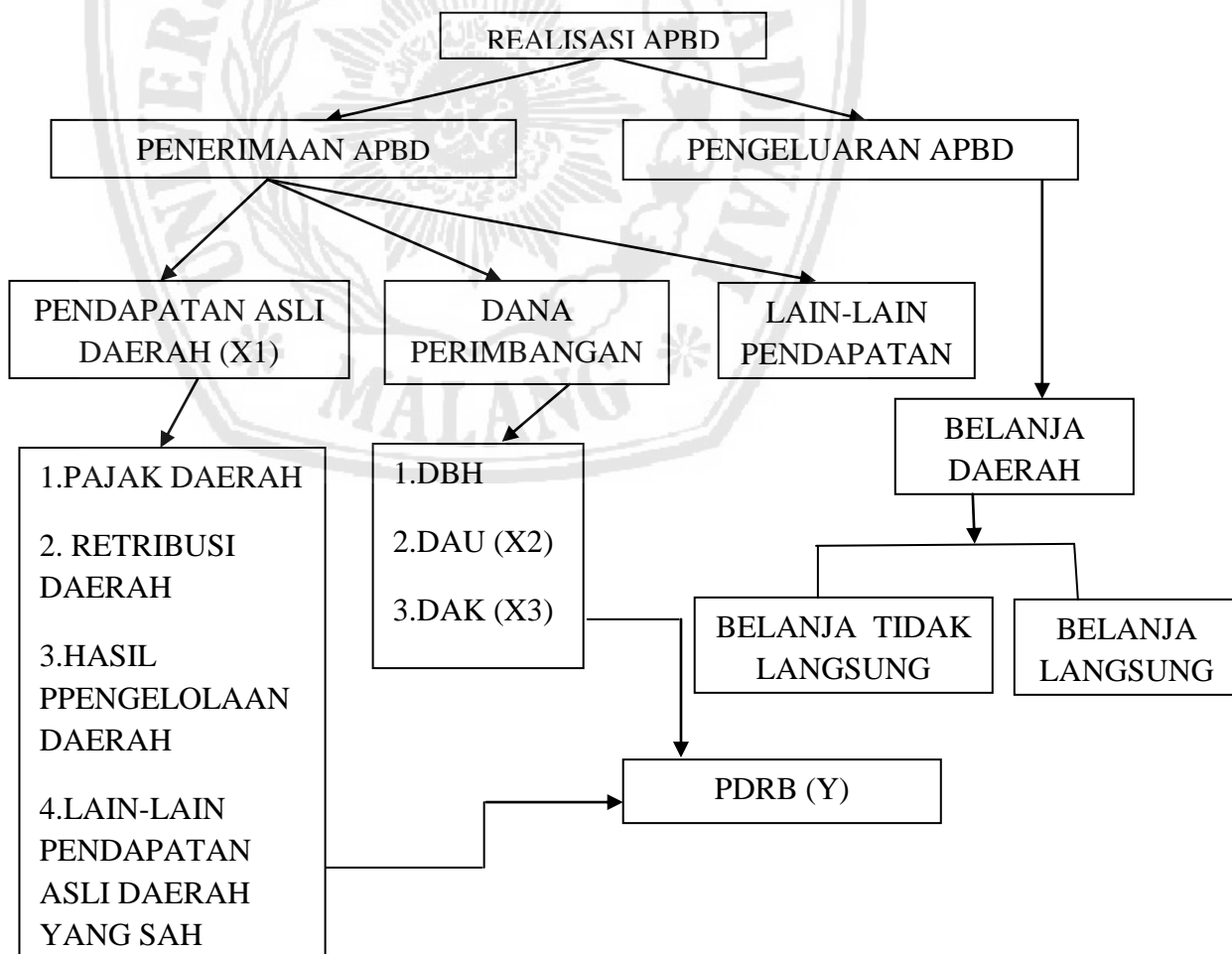
Menurut Oates (Hasdi Sasana, 2015) desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi ekonomi berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Sumber penerimaan daerah dalam desentralisasi fiskal adalah dari pendapatan asli daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jadi, dari sisi pengeluaran, implikasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dari dana perimbangan merupakan sisi penerimaan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang nantinya penerimaan akan terhimpun menjadi modal yang kemudian digunakan untuk belanja pembangunan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

H. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap PDRB Kabupaten/Kotadi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian samapai bukti data terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2016.

